

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN

GUBERNUR DI JAWA TIMUR

TESIS

Diajukan Kepada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum**



OLEH :

MURIDAH ISNAWATI

NIM : R 100070009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing I Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudari Muridah Isnawati

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara ;

Nama : Muridah Isnawati

N I M : R. 100070009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul : Penegakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur di Jawa Timur

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta,
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, M.Hum.

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Absori, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudari Muridah Isnawati

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara ;

Nama : Muridah Isnawati

N I M : R. 100070009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul : Penegakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur di Jawa Timur

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta,
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Absori, S.H., M.Hum

TESIS BERJUDUL
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DI JAWA TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

MURIDAH ISNAWATI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 29 Maret 2011

Dan dinyatakan telah memenuhi untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama,

Anggota Dewan Penguji Lain

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Prof. Dr. H. Harun, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pendamping I

Prof. Dr. H. Absori, S.H., M.Hum

Surakarta, 29 Maret 2011

Direktur,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya proses perkuliahan dan penulisan tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah surakarta. Tesis ini menganalisis Penegakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Di Jawa Timur.

Atas selesainya proses penulisan tesis ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk mengikuti pendidikan program pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Para dosen pembimbing tesis, Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum., dan Bapak Prof. Dr. H. Absori, S.H., M.Hum. atas segala petunjuk dan bimbingannya dalam penulisan tesis ini.
3. KPU Jawa Timur dan instansi terkait di Propinsi Jawa Timur atas diijinkannya saya mengadakan penelitian dan penulisan tesis ini
4. Pimpinan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian studi kepustakaan.

5. Para dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan banyak ilmu untuk peningkatan kinerja saya di masa depan.
6. Para responden/informan yang telah mendukung kelancaran proses penelitian dan penulisan tesis ini.
7. Suamiku tercinta, Sentot Tricahyono yang selalu memberikan dorongan dan semangat hingga selesainya studi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2007.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan tesis ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa membalas budi baik Bapak, Ibu, dan Saudara.

Surabaya, 20 Maret 2011

Muridah Isnawati

ABSTRAK

Muridah Isnawati. Tesis. Penegakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Di Jawa Timur. Program studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2011.

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam salah satu bagian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam Bagian Kedelapan Pasal 56 sampai dengan Pasal 119. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tentang Penegakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Di Jawa Timur sebagai refleksi dari pelaksanaan demokrasi pilkada. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang dilaksanakan sampai tiga putaran tentunya tidak terlepas dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Penelitian ini nantinya akan mengkaji secara khusus tentang pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana yang ditemukan pada pelaksanaan Pilgub Jawa Timur serta bagaimana upaya penegakan hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Kasus yang diambil dan dianalisis dalam penelitian ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama pelanggaran pidana pada saat pelaksanaan pemilihan gubernur di Jawa Timur pada tahun 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilgub Jawa Timur baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, sehingga pilgub dilaksanakan sampai tiga putaran. Dari berbagai fenomena pelanggaran pidana yang terjadi selama pelaksanaan pilgub di beberapa daerah di Jawa Timur, yang telah penulis paparkan baik sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pilgub berlangsung, cukup berdampak pada proses demokrasi yang telah berlangsung di Jawa Timur saat itu. Hingga pilgub harus digelar selama 3 putaran, meski diakui bahwa banyak sekali pelanggaran yang diproses dengan aturan-aturan mengenai pilgub, khususnya aturan yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tetapi dalam prosedur penyelesaiannya masih banyak terdapat kekurangan terutama mengenai Hukum Acara Pidana nya baik dalam proses Penyidikan, Penuntutan maupun Pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemilihan Gubernur, Pelanggaran Pidana

ABSTRACT

Muridah Isnawati. Thesis. In the Implementation of Criminal Law Enforcement In East Java gubernatorial election. Study Program Graduate Program Master of Legal Studies Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.

Direct regional head elections (elections) is one of the objectives of decentralization in the framework of regional autonomy. Election of regional head and deputy head of the regulated area in one part of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, namely in Section Eight of Article 56 through Article 119. Research conducted by the author is research on the Implementation of Criminal Law Enforcement In East Java gubernatorial election as a reflection of the implementation of democratic elections. Implementation of the East Java gubernatorial election held three rounds of course not independent of the number of violations that occurred well-pelanggara administrative violation or criminal offense. This study will examine specifically about the violations that are criminal who was found in East Java Pilgub pelaksanaan and how law enforcement efforts.

The research method used in this research is a qualitative method with case studies. While the analysis of the data used in this research is an interactive analysis. Cases are taken and analyzed in this study are the violations that occurred primarily at the commencement of criminal offenses in the East Java gubernatorial election in 2008.

The results of this study indicate that there are still many violations that occurred during the execution of both East Java pilgub administrative violation or criminal offense, so pilgub exercised until three rounds. Of the various phenomena of criminal violations that occurred during the execution pilgub in some areas in East Java, which has authors describe both before, during and after implementation of pilgub place, quite an impact on the democratic process that has taken place in East Java at the time. Until pilgub must be held for 3 rounds, although acknowledged that many violations are processed by the rules regarding pilgub, especially the rules stipulated in Law No. 32 of 2004 but the settlement procedures there are still many shortcomings, especially regarding the Code of Criminal Procedure was good in the process Investigation, Prosecution and Investigation in the trial court.

Keywords: Law Enforcement, Elections Governor, Criminal Violation

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Muridah Isnawati
NIM : R. 100070009
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini merupakan hasil plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Surabaya, Maret 2011

Yang menyatakan

Muridah Isnawati